

# PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT SEPTEMBER 2022





**PERKEMBANGAN  
TINGKAT KEMISKINAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
SEPTEMBER 2022**

# PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT SEPTEMBER 2022

ISSN : 2654-6841  
No. Publikasi : 32000.2307  
Katalog : 3205011.32

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : x + 59 halaman

## **Naskah:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

## **Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

## **Gambar Kulit:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

## **Diterbitkan oleh:**

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

## **Dicetak oleh:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.*

# PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT SEPTEMBER 2022

## TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : Marsudijono, S.Si., M.M.

Penanggung Jawab Teknis : Isti Larasati Widiastuty, SST., M.P.

Penulis dan Pengolah Data : Yayat Hidayat, S.ST, M.Stat

Raifa Mukti, S.Si., M.E

Pemeriksa Tabel : Hendy Hario Sasongko, S.ST., M.Stat

Infografis : Ferenda Kusdwinuryanto Saputro, S.ST

Penyunting / Editor : Isti Larasati Widiastuty, SST., M.P.

M. Jalaluddin, S.ST., M.Si



## KATA PENGANTAR

Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Untuk keperluan perencanaan, *monitoring* dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan khususnya di Jawa Barat, diperlukan sejumlah indikator yang menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin.

Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun melalui Berita Resmi Statistik (BRS) yang dilaksanakan setiap bulan Juli untuk potret kemiskinan bulan Maret dan pada bulan Januari untuk potret kemiskinan bulan September. Melengkapi ulasan yang disajikan pada BRS, BPS Provinsi Jawa Barat menyusun publikasi ini untuk mengupas lebih dalam data kemiskinan di Jawa Barat yang disajikan dalam bentuk publikasi "Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat September 2022".

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi terkini dan memberikan manfaat yang luas.

Bandung, Februari 2023

**Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Barat,**



**Marsudijono**



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan Penulisan .....	5
1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. KONDISI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT</b> .....	7
2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2021- September 2022 .....	9
2.2. Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan .....	11
2.3. Perbandingan Tingkat Kemiskinan secara Nasional .....	14
<b>BAB III. GARIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT</b> .....	17
3.1. Perubahan Garis Kemiskinan, September 2021-September 2022 .....	19
3.2. Peranan Komoditi terhadap Garis Kemiskinan, September 2022 .....	20

<b>BAB IV. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN</b> .....	25
4.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ).....	27
4.2. Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) .....	29
<b>BAB V. TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN</b> .....	31
5.1. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, September 2021-September 2022 .....	33
5.2. Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat, September 2021-September 2022 .....	35
<b>BAB VI. PENUTUP</b> .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	43
<b>CATATAN TEKNIS</b> .....	45

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.</b> Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2021-September 2022.....	10
<b>Tabel 2.</b> Peran Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2022.....	23

# DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1.</b> Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia, September 2022.....	15
<b>Gambar 2.</b> Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2021-September 2022.	20
<b>Gambar 3.</b> Garis Kemiskinan dan Peran Komoditi Makanan dan Nonmakanan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2022.....	21
<b>Gambar 4.</b> Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2021-September 2022.	28
<b>Gambar 5.</b> Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2021-September 2022.	30
<b>Gambar 6.</b> Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2021-September 2022.....	34
<b>Gambar 7.</b> Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2022 (persen).....	36
<b>Gambar 8.</b> <i>Gini Ratio</i> menurut Kurva Lorentz.....	57

## Bab 1 Pendahuluan

# Upaya Mengakhiri Kemiskinan Melalui Data



Mengakhiri kemiskinan menjadi **tujuan pertama** dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDG's



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024**

Dalam RPJMN 2020-2024 strategi pengurangan tingkat kemiskinan **menjadi salah satu prioritas** pembangunan nasional



RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, target persentase penduduk miskin Jawa Barat di tahun 2023 antara **5,42-5,77 persen.**



Tersedianya **DATA** kemiskinan yang akurat diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan



Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang. Dalam pengukurannya, BPS menggunakan konsep kemiskinan berdasarkan pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

“ Suatu penduduk dikatakan sebagai **PENDUDUK MISKIN** apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT**  
<https://jabar.bps.go.id>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di setiap negara. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan pertama dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDG's. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, yang kemudian akan mendasari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, energi, dan lain-lain.

Dalam RPJMN 2020-2024 strategi pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui, dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan sasaran makro pembangunan yaitu penurunan tingkat kemiskinan antara 6-7 persen pada akhir tahun 2024. Sementara itu, dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, target persentase penduduk miskin Jawa Barat di tahun 2023 antara 5,42-5,77 persen.

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat turut berkomitmen mengatasi berbagai persoalan yang ada demi tercapainya target SDG's. Terutama masalah kemiskinan yang menjadi prioritas utama. Tersedianya data kemiskinan yang akurat diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan

kemiskinan, dan pada akhirnya mampu mewujudkan Jawa Barat tanpa kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak saat itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian baru sejak tahun 2002, BPS dapat menyajikan data jumlah dan persentase penduduk miskin secara rutin setiap tahun.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan (makanan dan nonmakanan). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Apalagi untuk ekonomi Jawa Barat yang mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19, yang tentu berdampak pada kesejahteraan penduduk baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Haughton dan Khandker (2010), ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu:

1. Merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin,
2. Mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat,
3. Memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin,
4. Mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin.

## 1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat September 2022” disusun dengan tujuan mendukung penyediaan data kemiskinan. Publikasi ini menyajikan data perkembangan tingkat kemiskinan, perubahan Garis Kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Jawa Barat. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan. Dengan demikian, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dapat terus dipantau dari waktu ke waktu.

## 1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan di Jawa Barat menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi September 2021-September 2022. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran September 2021-September 2022.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari publikasi ini adalah sebagai berikut:

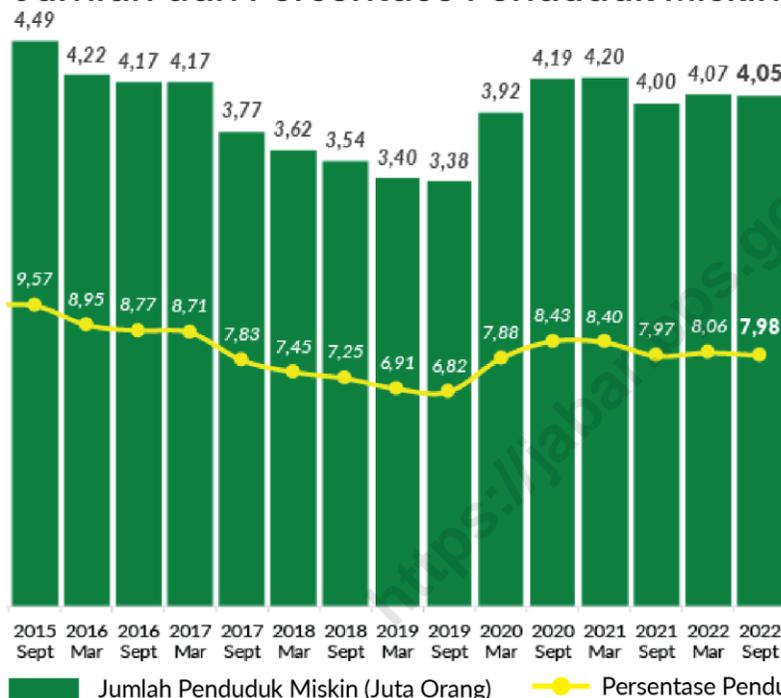
- Bab I** menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.
- Bab II** menjelaskan tentang perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat bulan September 2021-September 2022.
- Bab III** membahas tentang perubahan Garis Kemiskinan bulan September 2021-September 2022.
- Bab IV** membahas tentang Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ).
- Bab V** menjelaskan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Jawa Barat bulan September 2021-September 2022.
- Bab VI** menjelaskan penutup berupa kesimpulan.

Selain itu, pada bagian lampiran disajikan catatan teknis terkait metode penghitungan kemiskinan dan ketimpangan.

# Kondisi Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat



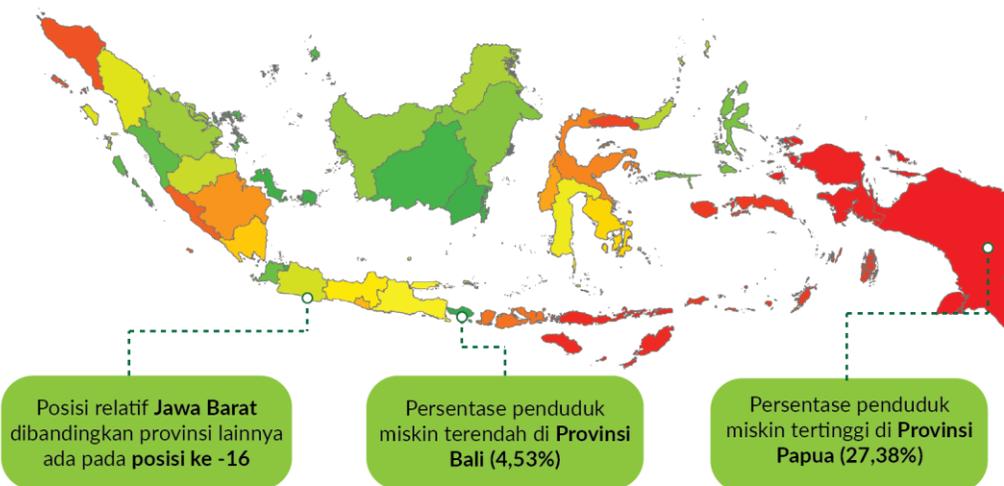
## Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2022



- Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar **4,05 juta orang**, menurun 17,36 ribu orang terhadap Maret 2022 dan meningkat 48,76 ribu orang terhadap September 2021.
- Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar **7,98 persen**, menurun 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,01 persen poin terhadap September 2021.



## Posisi kemiskinan Jawa Barat secara nasional, September 2022





# BAB II

## KONDISI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT

### 2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2021-September 2022

Seperti disampaikan pada bagian terdahulu, setiap tahun BPS memotret tingkat kemiskinan sebanyak dua kali. Selama periode September 2021-September 2022 terdapat tiga titik waktu pengamatan yaitu pada September 2021, Maret 2022 dan September 2022. Dari tiga titik waktu pengamatan tersebut, tingkat kemiskinan Maret 2022 adalah yang tertinggi.

Tingkat kemiskinan atau *headcount index* ( $P_0$ ) merupakan indikator untuk mengukur persentase penduduk dalam suatu populasi penduduk. Rumus penghitungan tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut :

$$P_0 = \frac{N_p}{N}$$

dimana :

$N_p$  adalah jumlah penduduk miskin dan

$N$  adalah total populasi.

Berdasarkan Susenas September 2022 jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 4,05 juta orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 17,36 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan

September 2021, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 48,76 ribu orang. Persentase penduduk miskin Jawa Barat pada September 2022 tercatat sebesar 7,98 persen, menurun 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,01 persen poin terhadap September 2021.

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2021 - September 2022**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
<b>Perkotaan</b>		
September 2021	2,95	7,48
Maret 2022	3,01	7,57
September 2022	3,02	7,52
<b>Perdesaan</b>		
September 2021	1,05	9,76
Maret 2022	1,06	9,88
September 2022	1,03	9,75
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>		
September 2021	4,00	7,97
Maret 2022	4,07	8,06
September 2022	4,05	7,98

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 - 2022

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, selama periode September 2021-September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebesar 68,33 ribu orang. Namun di perdesaan justru mengalami penurunan sebesar 19,57 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 7,48 persen menjadi 7,52 persen pada September 2022. Sementara itu, di

perdesaan turun dari 9,76 persen pada September 2021 menjadi 9,75 persen (September 2022).

Apabila dilihat selama periode Maret-September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan bertambah 9,04 ribu orang dan di perdesaan menurun 26,41 ribu orang. Namun demikian, jika dilihat dari persentase penduduk miskin, di perkotaan menurun dari 7,57 persen menjadi 7,52 persen. Sementara itu, di perdesaan juga mengalami penurunan dari 9,88 persen menjadi 9,75 persen pada periode yang sama.

## **2.2. Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berbagai penelitian terdahulu seperti disampaikan Haughton dan Kandker (2012) menyatakan berbagai hal yang disinyalir sebagai penyebab utama terjadinya kemiskinan, diantaranya adalah :

1. Karakteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintahan, serta hak milik dan pelaksanaannya.
2. Karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan), kedekatan dengan pasar, dan hubungan sosial.
3. Karakteristik rumah tangga dan individu, di antaranya yang paling penting adalah :
  - a. Demografis, seperti jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan jenis kelamin kepala rumah tangga.
  - b. Ekonomi, seperti status pekerjaan, jam kerja dan harta benda yang dimiliki.

- c. Sosial, seperti status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal.

Potret tingkat kemiskinan berdasarkan hasil Susenas September 2022 berkaitan erat dengan pola aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, perubahan harga (inflasi) dan tingkat pengangguran yang cenderung dinamis. Kondisi kemiskinan Jawa Barat pada September 2022 jika dibandingkan dengan periode Maret 2022 maupun September 2021, dipengaruhi oleh perubahan berbagai indikator di Jawa Barat. Beberapa indikator-indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan September 2022 di Jawa Barat diantaranya :

1. Produksi padi hasil Kerangka Sampel Area (KSA) pada September tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan September Tahun 2021. Demikian halnya dengan harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) menunjukkan adanya peningkatan pada periode yang sama.
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat. Hal tersebut tercermin dari pengeluaran konsumsi rumah tangga kondisi triwulan III tahun 2022 yang tumbuh 5,03 persen jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021 (*year on year*).
3. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2022 mencapai 100,46, meningkat 3,81 persen (*year on year*) dan Indeks yang Diterima Petani pada September 2022 meningkat 8,14 persen jika dibandingkan September 2021. Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan daya beli petani.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kondisi Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021 menurun dari 9,82 menjadi 8,31 persen. Rata-rata upah

buruh/karyawan/pegawai pada periode yang sama, juga mengalami peningkatan.

5. Kenaikan harga BBM yang mulai berlaku pada 3 September 2022, berdampak pada kenaikan harga-harga komoditi di bulan September 2022. Inflasi umum pada September 2022 mencapai 6,12 persen (*year on year*). Adapun inflasi komoditi makanan, minuman dan tembakau mencapai 9,27 persen. Kenaikan harga-harga khususnya komoditi yang memiliki pengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan (GK) menyebabkan kenaikan GK yang cukup besar.
6. Berbagai bantuan sosial yang digulirkan pemerintah diantaranya Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan subsidi upah (senilai Rp600.000) bagi pekerja yang berpenghasilan kurang dari Rp3.500.000 per bulan dan bantuan sosial lainnya cukup membantu meringankan beban pengeluaran penduduk.

Berdasarkan beberapa faktor ekonomi di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 yang disertai dengan peningkatan konsumsi rumah tangganya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat Jawa Barat yang semakin meningkat. Hal tersebut juga didukung oleh Indeks NTP yang di atas 100 dan disertai peningkatan hasil produksi padi berikut dengan kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) dan harga Gabah Kering Giling), memberikan gambaran dampak positif terhadap kemampuan daya beli dari masyarakat khususnya masyarakat di sektor pertanian. Ditambah lagi berbagai program bantuan sosial yang digulirkan cukup membantu meringankan beban pengeluaran penduduk walaupun telah terjadi kenaikan harga-harga komoditi akibat adanya kenaikan BBM di awal

September 2022 yang tergambar dari inflasi yang mencapai 6,12 (*year on year*).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pada dasarnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah secara terus-menerus adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat (khususnya masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari kemiskinan) dan bagaimana menjaga stabilitas harga-harga (khususnya komoditi-komoditi yang memberikan andil besar dalam pembentukan Garis Kemiskinan) agar tidak mengganggu daya beli dari masyarakat itu sendiri.

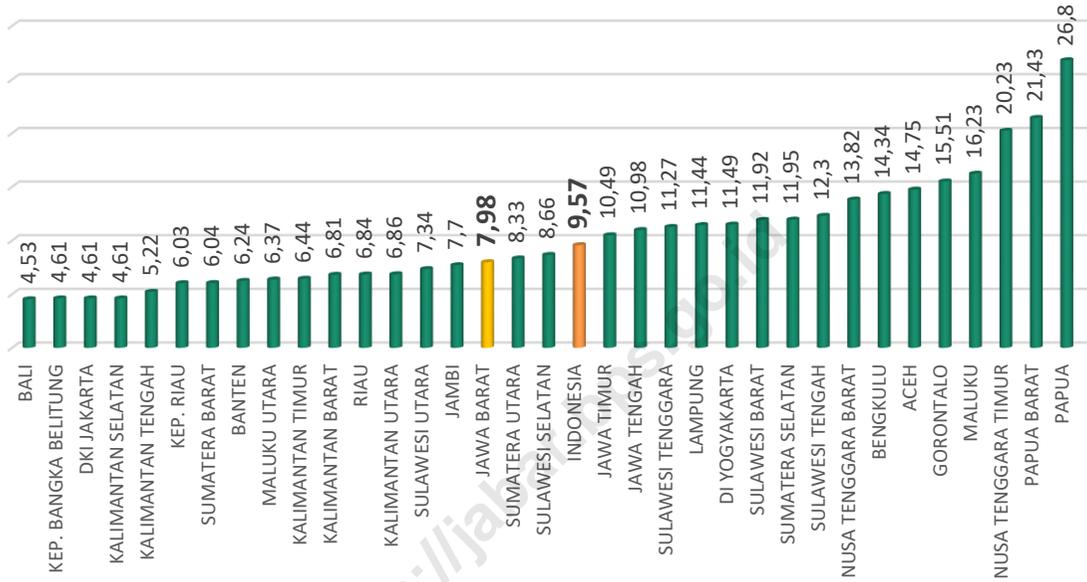
### **2.3. Perbandingan Tingkat Kemiskinan secara Nasional**

Posisi relatif angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya pada September 2022 berada pada posisi ke-16 dari 34 provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah. Persentase penduduk miskin yang terendah di Indonesia ditempati Provinsi Bali dengan angka 4,53 persen dan yang tertinggi yaitu Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan sebesar 26,80 persen. Jika dilihat dari provinsi yang ada di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga terkecil setelah DKI Jakarta dan Banten (Gambar 1). Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, maka tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat masih lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,57 persen pada September 2022.

Gambar 1 menunjukkan masih adanya disparitas tingkat kemiskinan di Indonesia. Disparitas kemiskinan antraprovinsi di Indonesia ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi. Masalah keterpencilan wilayah dan

akses terhadap sumberdaya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan disparitas kemiskinan antarprovinsi.

**Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Indonesia, September 2022**



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2022



# Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat



Garis Kemiskinan, September 2022 (per kapita per bulan)



## Rp480.350

▲ 9,77%\*



Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Rp355.172

▲ 9,78%\*



Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)

Rp125.178



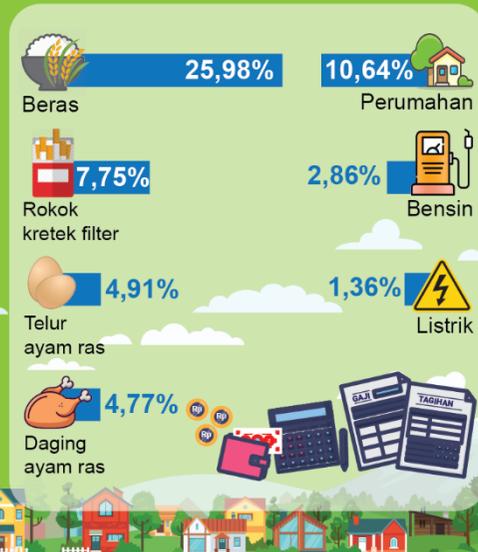
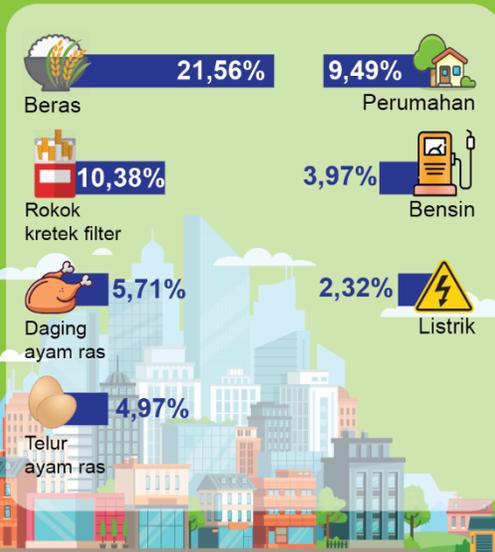
▲ 9,73%\*

\*Dibandingkan September 2021

## Daftar Komoditas Makanan dan Nonmakanan yang Memberikan Sumbangan Terbesar Terhadap Garis Kemiskinan, September 2022

### Perkotaan

### Perdesaan





## BAB III

# GARIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

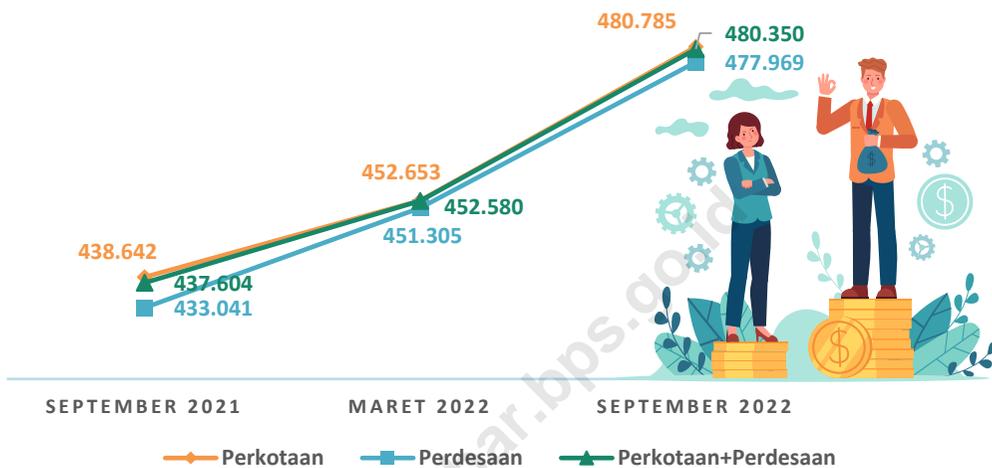
### 3.1. Perubahan Garis Kemiskinan, September 2021- September 2022

Dalam proses penghitungan kemiskinan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok nonmakanan. GK digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Seseorang dikatakan penduduk miskin jika pengeluaran per kapitanya per bulan lebih rendah dari GK, sebaliknya seseorang dikatakan tidak miskin jika pengeluaran per kapitanya per bulan lebih tinggi dari GK. GK dihasilkan dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Selama kurun waktu September 2021-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,77 persen dari Rp437.604 per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp480.350 per kapita per bulan pada September 2022. Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, GK perdesaan kenaikannya lebih tinggi yaitu sebesar 10,38 persen. Yaitu dari Rp433.041 per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp477.969 per kapita per bulan pada September 2022. Sedangkan GK perkotaan mengalami kenaikan sebesar 9,61 persen dari Rp438.642 per kapita per bulan di

September 2021 menjadi Rp480.785 per kapita per bulan pada September 2022 (Gambar 2).

**Gambar 2. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2021 – September 2022**



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 - 2022

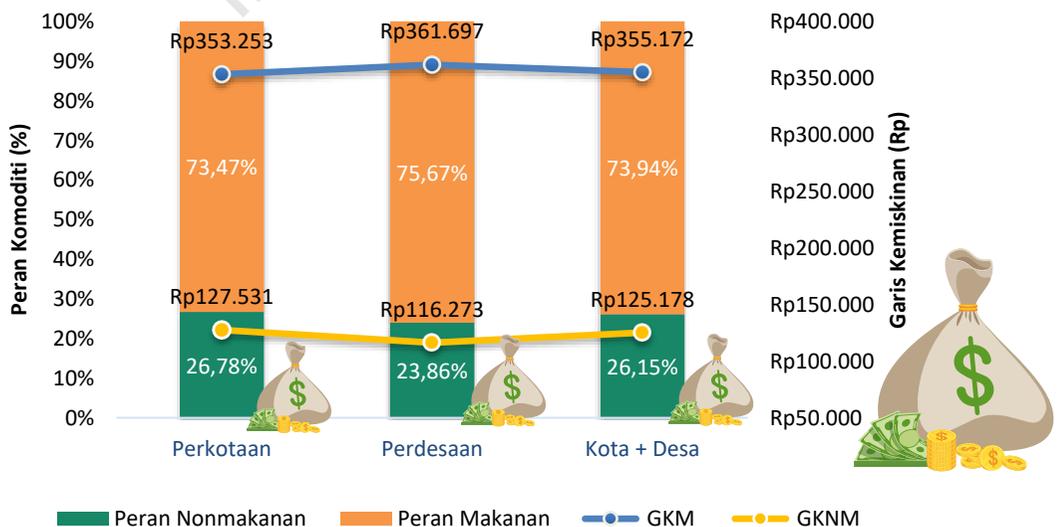
### 3.2. Peranan Komoditi terhadap Garis Kemiskinan, September 2022

Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada September 2022, GKM Jawa Barat mencapai Rp355.172 per kapita per bulan dan GKNM sebesar Rp125.178 per kapita per bulan. Jika dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, GKM di perdesaan lebih tinggi dibandingkan GKM di perkotaan yaitu Rp361.697 per kapita per bulan dibandingkan Rp353.253 per kapita per bulan. Tetapi sebaliknya, untuk GKNM di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu mencapai Rp127.531 per kapita per bulan di perkotaan

sedangkan di perdesaan mencapai Rp116.273 per kapita per bulan (Gambar 3).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan sangat dominan dibandingkan peran komoditi nonmakanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan nonmakanan. Sumbangan GKM terhadap Garis Kemiskinan pada September 2022 sebesar 73,47 persen di perkotaan dan 75,67 persen di perdesaan. Secara total peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,94 persen.

**Gambar 3. Garis Kemiskinan dan Peran Komoditi Makanan dan Nonmakanan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2022**



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2022

Tabel 2 memperlihatkan komoditi yang memberikan sumbangan terbesar pada GK. Jika dilihat, komoditi yang menjadi penyumbang terbesar GK pada September 2022, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan adalah beras. Di perkotaan, beras menyumbang 21,56 persen terhadap GK sedangkan di perdesaan bisa mencapai 25,98 persen. Besarnya sumbangan beras dalam GK karena beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia khususnya masyarakat miskin. Oleh karena itu, peran Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras di masyarakat menjadi penting.

Posisi kedua terbesar sebagai penyumbang GK adalah rokok kretek filter. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sebenarnya kalau dilihat makanan yang menghasilkan kalori, rokok kretek tidak termasuk dalam hal ini. Namun karena rokok kretek banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin sehingga tetap dimasukkan dalam penghitungan Garis Kemiskinan. Komoditi rokok kretek filter memberikan sumbangan sebesar 10,38 persen untuk daerah perkotaan dan 7,75 persen di perdesaan.

Selanjutnya komoditi urutan ketiga sampai kelima sebagai penyumbang terbesar untuk GK di perkotaan adalah daging ayam ras (5,71 persen), telur ayam ras (4,97 persen), dan kopi bubuk & kopi instan (*sachet*) (3,10 persen). Sedangkan di perdesaan, telur ayam ras menyumbang sebesar 4,91 persen, daging ayam ras sebesar 4,77 persen serta kopi bubuk dan kopi instan (*sachet*) sebesar 2,94 persen.

**Tabel 2. Sumbangan Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2022 (persen)**



Komoditi	Perkotaan	Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Makanan</b>	<b>73,47</b>	<b>Makanan</b>	<b>75,67</b>
Beras	21,56	Beras	25,98
Rokok kretek filter	10,38	Rokok kretek filter	7,75
Daging ayam ras	5,71	Telur ayam ras	4,91
Telur ayam ras	4,97	Daging ayam ras	4,77
Kopi bubuk & kopi instan ( <i>sachet</i> )	3,10	Kopi bubuk & kopi instan ( <i>sachet</i> )	2,94
Mie instan	3,00	Mie instan	2,83
Roti	2,14	Roti	2,50
Kue Basah	2,01	Tahu	1,80
Kue kering/biskuit	1,99	Kue basah	1,63
Tahu	1,90	Cabe rawit	1,54
Lainnya	16,70	Lainnya	19,03
<b>Nonmakanan</b>	<b>26,53</b>	<b>Nonmakanan</b>	<b>24,33</b>
Perumahan	9,49	Perumahan	10,64
Bensin	3,97	Bensin	2,86
Listrik	2,32	Listrik	1,36
Pendidikan	1,58	Perlengkapan mandi	1,07
Perlengkapan mandi	1,21	Pendidikan	0,87
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,79	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,74
Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,72	Sabun cuci	0,71
Angkutan	0,70	Kesehatan	0,67
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,68	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,65
Pakaian jadi anak-anak	0,62	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,59
Lainnya	4,44	Lainnya	4,17



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2022

Untuk komoditi nonmakanan yang memberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah perumahan yaitu sebesar 9,49 persen, bensin yaitu sebesar 3,97 persen, listrik yaitu sebesar 2,32 persen,

pendidikan yaitu sebesar 1,58 persen dan perlengkapan mandi yaitu sebesar 1,21 persen. Sedangkan lima komoditi nonmakanan penyumbang terbesar terhadap GK di daerah perdesaan secara berturut-turut adalah perumahan sebesar 10,64 persen, bensin sebesar 2,86 persen, listrik sebesar 1,36 persen, perlengkapan mandi sebesar 1,07 persen dan pendidikan sebesar 0,87 persen.

<https://jabar.bps.go.id>

## Bab 4

# INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN





## BAB IV

# INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN

### 4.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )

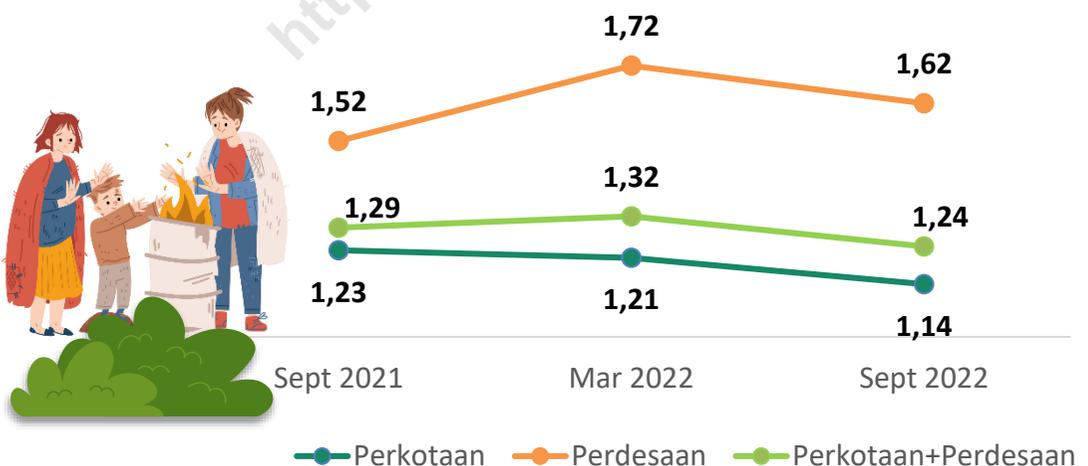
Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- $P_1$ ) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai  $P_1$  ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai  $P_1$  maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai  $P_1$  mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati Garis Kemiskinan. Adapun Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Poverty Severty Index*- $P_2$ ) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran

pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai  $P_2$  maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode September 2021 - Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) di Jawa Barat menunjukkan kenaikan.  $P_1$  naik dari 1,29 pada keadaan September 2021 menjadi 1,32 pada keadaan Maret 2022. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan. Jika dilihat menurut wilayah,  $P_1$  di perdesaan mengalami kenaikan yang lebih besar, yaitu dari 1,52 pada September 2021 menjadi 1,72 pada Maret 2022. Sedangkan di wilayah perkotaan,  $P_1$  justru mengalami penurunan dari 1,23 pada September 2021 menjadi 1,21 pada Maret 2022 (Gambar 4).

**Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )  
Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah,  
September 2021 - September 2022**



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2021-2022

Namun demikian, pada periode September 2022 indeks  $P_1$  kembali mengalami penurunan menjadi 1,24. Apabila dilihat berdasarkan daerah, penurunan ini terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Dimana  $P_1$  di perdesaan menjadi 1,62 dan di perkotaan menjadi 1,14. Hal menarik lainnya yang dapat kita lihat adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan selalu lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih mendekati Garis Kemiskinannya dibandingkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin di perdesaan terhadap Garis Kemiskinannya. Dengan kata lain, pengentasan penduduk miskin di perdesaan memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan yang di perkotaan.

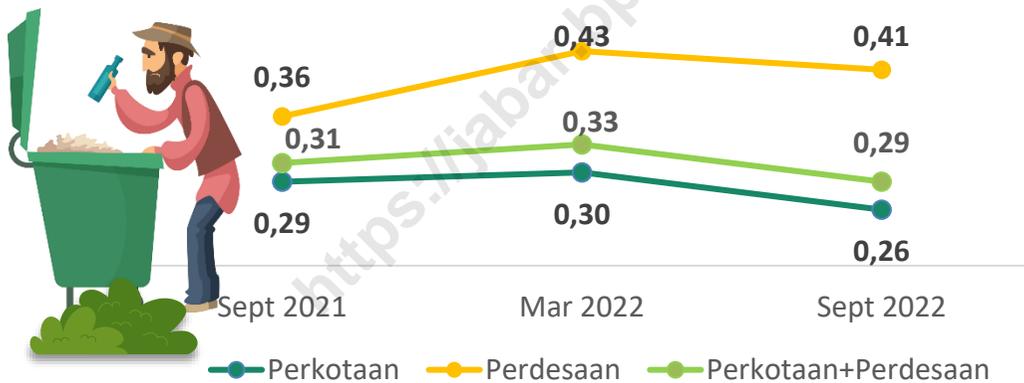
Selanjutnya, jika dibandingkan secara *year to year*, maka dapat kita lihat bahwa  $P_1$  September 2021 mengalami penurunan dari 1,29 menjadi 1,24 pada September 2022. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati terhadap Garis Kemiskinan. Penurunan  $P_1$  tersebut lebih dipengaruhi oleh penurunan  $P_1$  di wilayah perkotaan, karena  $P_1$  perkotaan menurun dari 1,23 menjadi 1,14. Sementara  $P_1$  di perdesaan justru mengalami kenaikan dari 1,52 menjadi 1,62 pada September 2022.

## 4.2. Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )

Hasil Susenas September 2022, menunjukkan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 0,29. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan  $P_2$  pada Maret 2022 yang mencapai 0,33. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan

pengeluaran antarpenduduk miskin cenderung semakin menyempit. Pada kurun waktu yang sama,  $P_2$  di wilayah perkotaan turun dari 0,30 pada Maret 2022 menjadi 0,26 pada September 2022. Demikian halnya di perdesaan,  $P_2$  mengalami penurunan dari 0,43 pada Maret 2022 menjadi 0,41 pada September 2022. Senada dengan  $P_1$ , nilai  $P_2$  di perkotaan juga selalu lebih kecil dibandingkan perdesaan. Hal ini menunjukkan kesenjangan antarpenduduk miskin perdesaan lebih parah dibandingkan dengan kesenjangan antarpenduduk miskin di perkotaan.

**Gambar 5. Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2021 – September 2022**



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2021-2022

Begitu pun jika dilihat secara *year to year*, maka dapat kita lihat bahwa nilai  $P_2$  menggambarkan pola yang sama dengan  $P_1$ . Dimana nilai  $P_2$  pada September 2022 lebih kecil dibandingkan kondisi September 2021 dan hal tersebut lebih dipengaruhi oleh  $P_2$  di perkotaan yang turun dari 0,29 pada September 2021 menjadi 0,26 pada September 2022. Sementara di perdesaan  $P_2$  mengalami kenaikan dari 0,36 pada September 2021 menjadi 0,41 pada September 2022.

# TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN



**GINI RATIO**  
September 2022

**0,412** <sup>-0,005\*</sup>

Tergolong kategori sedang

**0**

**Gini ratio=0.** ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan lainnya.

**1**

**Gini ratio=1.** ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Distribusi Pengeluaran, September 2022

**16,78%**

Penduduk di Jawa Barat berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah

Hal ini menunjukkan bahwa menurut ukuran ketimpangan Bank Dunia, Jawa Barat berada pada kategori **Ketimpangan sedang** bahkan hampir mendekati kategori ketimpangan rendah.



\*Dibandingkan September 2021





# BAB V

## TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN

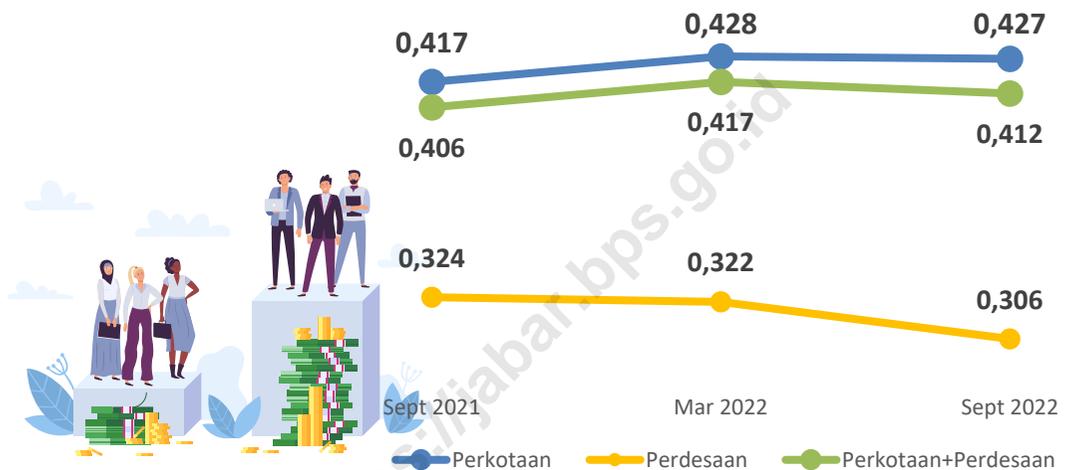
### 5.1. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, September 2021-September 2022

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Distribusi pendapatan yang timpang dapat memperburuk pembangunan ekonomi jika perencanaan pendapatan tidak dilakukan secara tepat dan menyeluruh.

Aspek yang perlu menjadi perhatian mengenai kemiskinan selanjutnya adalah distribusi pendapatan penduduk. Dikarenakan data mengenai pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi pendapatan selama ini menggunakan pendekatan data pengeluaran. Banyak ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, salah satunya dengan *Gini Ratio*. *Gini Ratio* adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai *Gini Ratio* ini berkisar antara

0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* maka semakin tinggi pula ketimpangannya. Nilai 0,3 ke bawah termasuk dalam ketimpangan rendah, 0,3 – 0,5 termasuk ketimpangan sedang dan di atas 0,5 masuk pada ketimpangan tinggi.

**Gambar 6. Perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal, September 2021 – September 2022**



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2021-2022

Secara umum perkembangan nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat periode September 2021 – September 2022 mengalami fluktuasi. Pada September 2021, nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat sebesar 0,406 dan naik menjadi 0,417 pada Maret 2022. Kemudian pada September 2022 *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan menjadi sebesar 0,412. Namun secara *year on year*, nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat meningkat pada September 2022, yang artinya ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Jawa Barat semakin melebar.

Sementara itu, berdasarkan tipe daerah, dalam kurun waktu September 2021 – September 2022, pada daerah perkotaan dan perdesaan angka *Gini Ratio* memiliki pola perubahan yang berbeda. *Gini Ratio* di wilayah perkotaan mirip dengan *Gini Ratio* total dimana pada bulan Maret 2022 mengalami kenaikan kemudian menurun pada September 2022. Pada September 2021 *Gini Ratio* di perkotaan sebesar 0,417, kemudian naik menjadi 0,428 pada Maret 2022 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 0,427 pada September 2022. Sementara itu, *Gini Ratio* di perdesaan pada September 2021 adalah sebesar 0,324, kemudian mengalami penurunan pada Maret 2022 menjadi 0,322 dan Kembali mengalami penurunan yang cukup besar pada September 2022 menjadi 0,306. Hal ini menunjukkan pada bulan September 2021 – September 2022, perubahan kondisi ketimpangan di perdesaan konsisten semakin menyempit. Ketimpangan pengeluaran penduduk berdasarkan *Gini Ratio* di Jawa Barat ini termasuk pada kategori ketimpangan sedang, baik di perkotaan, perdesaan maupun keseluruhan.

## 5.2 Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat, September 2021-September 2022

Selain menggunakan *Gini Ratio*, salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah itu nilainya ada di bawah 12 persen,
2. Ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen,

3. Ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.

Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat adalah sebesar 16,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa menurut ukuran ketimpangan Bank Dunia, Jawa Barat berada pada kategori ketimpangan sedang bahkan hampir mendekati kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada September 2022 ini naik 0,32 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 16,46 persen dan naik 0,25 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang sebesar 16,53 persen. Hal ini menunjukkan secara *year on year*, kondisi ketimpangan Jawa Barat pada September 2022 semakin menyempit.

**Gambar 7. Persentase Pengeluaran Penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Jawa Barat menurut Tipe Daerah, September 2021 – September 2022 (Persen)**



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2021-2022

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama, yaitu ketimpangan di daerah pedesaan selalu menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan di daerah perkotaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan Jawa Barat pada September 2022 adalah 16,03 persen, naik 0,88 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2021. Sementara persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah pedesaan pada September 2022 sebesar 21,33 persen, naik 0,19 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2021. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan di Jawa Barat termasuk ke dalam ketimpangan sedang sementara daerah pedesaan termasuk ketimpangan rendah.



# KEMISKINAN JAWA BARAT SEPTEMBER 2022



4,05

JUTA ORANG

Jumlah Penduduk miskin

Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen poin jika dibandingkan keadaan Maret 2022 dan naik 1,25 persen poin jika dibandingkan keadaan September 2021

Garis Kemiskinan  
**Rp480.350**  
PER KAPITA PER BULAN

Pada September 2022, peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih mendominasi dibandingkan komoditi non makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan pada September 2022 mencapai 73,94 persen.

**Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan**

Pada September 2022, P<sub>1</sub> dan P<sub>2</sub> di Jawa Barat menurun jika dibandingkan Maret 2022 dan September 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin di Jawa Barat juga cenderung menyempit.

P<sub>1</sub>

1,24

P<sub>2</sub>

0,29

Semakna dengan kenaikan *Gini Ratio*, kesenjangan berdasarkan kriteria Bank Dunia mengalami peningkatan. Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat sebesar 16,78 persen.

nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat naik dibandingkan September 2021

0,417

GINI RATIO





# BAB VI

## PENUTUP

Pada September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat sebesar 4,05 juta jiwa (7,98 persen). Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen poin jika dibandingkan keadaan Maret 2022 dan naik 1,25 persen poin jika dibandingkan keadaan September 2021.

Garis Kemiskinan (GK) Jawa Barat pada September 2022 sebesar Rp480.350 per kapita per bulan. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 9,77 persen jika dibandingkan dengan kondisi September 2021. Pada September 2022, peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih mendominasi dibandingkan komoditi nonmakanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan pada September 2022 mencapai 73,94 persen.

Pada September 2022,  $P_1$  di Jawa Barat mencapai angka 1,24, menurun jika dibandingkan Maret 2022 dan September 2021. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2022 cenderung lebih dekat dengan Garis Kemiskinannya. Demikian halnya Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ), pada September 2022 mencapai angka 0,29, menurun jika dibandingkan Maret 2022 dan September 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin di Jawa Barat juga cenderung menyempit.

Pada September 2022, nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat naik menjadi 0,412 dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,406. Semakna dengan kenaikan *Gini Ratio*, kesenjangan berdasarkan kriteria Bank Dunia mengalami peningkatan. Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat sebesar 16,78 persen, naik dari 16,53 persen pada keadaan September 2021.

<https://jabar.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022 No. 07/01/Th.XXVI, 16 Januari 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2022. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Jawa Barat September 2022 No. 06/01/32/Th.XXV, 16 Januari 2023. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2022. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat, Maret 2022. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2021. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat, September 2021. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- BPS, Bappenas dan UNDP. 2001. *Laporan Pembangunan Manusia 2001: Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta: BPS. Bappenas. UNDP.]
- Haughton & Khandker. 2010. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC. Halaman 181.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suyanto, Bagong. 1995. *Perangkap Kemiskinan: Problem & Strategi Pengentasannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2021: Atacking Poverty*. Washington, DC: World Bank.





# Catatan Teknis

## Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang dinilai dari standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan nonmakanan.



## Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan sementara. Garis Kemiskinan sementara adalah Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.



**GKM** adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

**GKNM** merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi bukan makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.



Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai **penduduk miskin (PM)**



## Kemiskinan Absolut

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.



## Konsep Kemiskinan BPS

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.



## Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran yang dilaksanakan setiap semester yaitu pada Maret dan September setiap tahunnya.



## Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) secara matematis:

$$GK = GKM + GKNM$$





## CATATAN TEKNIS

### 1. Literatur Kemiskinan

- ❖ Berdasarkan asal penyebab, kemiskinan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
  - **Kemiskinan kultural** adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.
  - **Kemiskinan struktural** adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".
- ❖ Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, di mana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian **kemiskinan relatif** merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian **kemiskinan secara absolut** merupakan standar kehidupan

minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun nonmakanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai Garis Kemiskinan.

- ❖ Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran **kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.**
- ❖ Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Garis Kemiskinan. Pembentukan Garis Kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum.

### 1.1. Terminologi Kemiskinan Lainnya

- ❖ Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan". Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan

tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut mestinya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

- ❖ Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan sosial budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat.
- ❖ Kemiskinan menurut *World Bank* (2000) didefinisikan sebagai, “*poverty is pronounced deprivation in well-being*” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan.
- ❖ *United Nations Development Program* (UNDP) di tahun 2001 mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan

memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan.

- ❖ Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

## **2. Metode Penghitungan kemiskinan**

### **2.1. Konsep**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

### **2.2. Sumber Data**

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok nonmakanan. Untuk penimbang data Susenas (*weight*) yang

digunakan mulai tahun 2021 merupakan *backcasting* dari penimbang proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

### **2.3. Metode**

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan dapat ditulis secara matematis sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

### **2.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan**

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis

Kemiskinan Sementara adalah Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

$GKM^*_{jp}$  : Garis Kemiskinan Makanan daerah  $j$  (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori)

kalori) provinsi  $p$

$P_{jkp}$  : Rata-rata harga komoditi  $k$  di daerah  $j$  dan provinsi  $p$

$Q_{jkp}$  : Rata-rata kuantitas komoditi  $k$  yang dikonsumsi di daerah  $j$  di provinsi  $p$

$V_{jkp}$  : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi  $k$  di daerah  $j$  provinsi  $p$

$j$  : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

$p$  : Provinsi ke- $p$ .

Selanjutnya untuk memperoleh GKM tersebut dilakukan penyetaraan harga 2.100 kilokalori dengan cara mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah  $j$  dari penduduk referensi, sebagai berikut:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

$K_{jkp}$  : Kalori dari komoditi  $k$  di daerah  $j$  di provinsi  $p$

$\overline{HK}_{jp}$  : Harga rata – rata kalori di daerah  $j$  di provinsi  $p$

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2.100$$

$GKM$  : Kebutuhan minimum makanan di daerah  $j$ , yaitu yang menghasilkan energi yang setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari

$j$  : Daerah (perkotaan/perdesaan)

$p$  : Provinsi  $p$

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi nonmakanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum nonmakanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{jkp} \cdot V_{jkp}$$

$GKNM_{jp}$  : Pengeluaran minimum nonmakanan atau Garis Kemiskinan nonmakanan daerah  $j$  dan provinsi  $p$

$V_{jkp}$  : Nilai pengeluaran per komoditi/subkelompok nonmakanan daerah  $j$  dan provinsi  $p$

$r_{kj}$  : Rasio pengeluaran komoditi/subkelompok nonmakanan  $k$  menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah  $j$

$k$  : Jenis komoditi nonmakanan terpilih

$j$  : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

$p$  : Provinsi ke- $p$

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

$\%PM_p$  : % Penduduk miskin di provinsi  $p$

$PM_p$  : Jumlah penduduk miskin di provinsi  $p$

$P_p$  : Jumlah penduduk provinsi  $p$

## 2.5. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. Pertama, *Head Count Index* (HCI- $P_0$ ), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- $P_1$ ) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan.
3. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- $P_2$ ) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

$\alpha$  : 0, 1, 2

$z$  : Garis kemiskinan

$y_i$  : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan ( $i=1,2,\dots,q$ ),  $y_i < z$

$q$  : Banyaknya penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan

$n$  : Jumlah penduduk.

Jika  $\alpha = 0$ , diperoleh *Head Count Index* ( $P_0$ ), jika  $\alpha = 1$  diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- $P_1$ ) dan jika  $\alpha = 2$  disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- $P_2$ ).

### 3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

#### 3.1 *Gini Ratio* (Koefisien Gini)

*Gini Ratio* adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus *Gini Ratio* adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - x_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

G : *Gini Ratio* (Koefisien Gini)

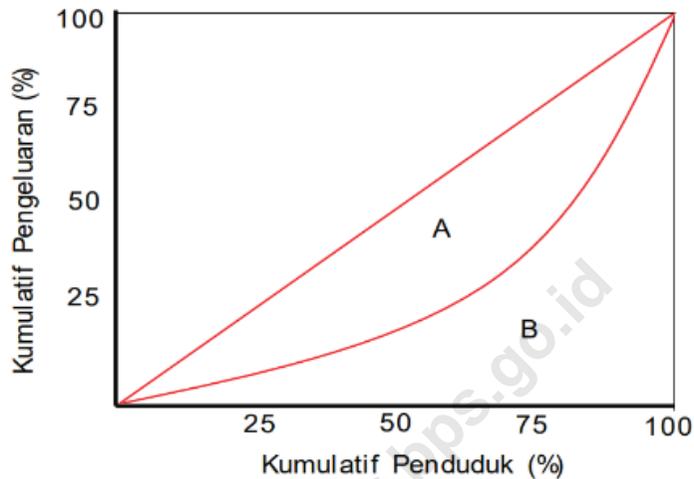
$X_k$  : Proporsi kumulatif dari penduduk untuk  $k = 0, 1, 2, \dots, n$  dengan  $X_0 = 0$   
dan  $X_1 = 1$

$Y_k$  : Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk  $k = 0, 1, 2, \dots, n$  dengan  $Y_0 = 0$   
dan  $Y_1 = 1$

Nilai *Gini Ratio* ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai *Gini Ratio* adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

*Gini Ratio* didasarkan pada kurva Lorenz (Gambar 8), yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk *Gini Ratio*, grafik persentase kumulatif penduduk (dari kelompok termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. *Gini Ratio* didefinisikan sebagai  $A/(A+B)$ ,

dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika  $A=0$  *Gini Ratio* bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika  $B=0$  *Gini Ratio* akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.



**Gambar 8. *Gini Ratio* Menurut Kurva Lorentz**

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. *Gini Ratio* memenuhi syarat ini.
2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). *Gini Ratio* juga memenuhi syarat ini.
3. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. *Gini Ratio* juga memenuhi hal ini.

4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin akan menurunkan ketimpangan. *Gini Ratio* juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

1. Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. *Gini Ratio* tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antarkelompok. Yakni nilai total *Gini Ratio* dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai *Gini Ratio* dari subkelompok masyarakat (subgrup).

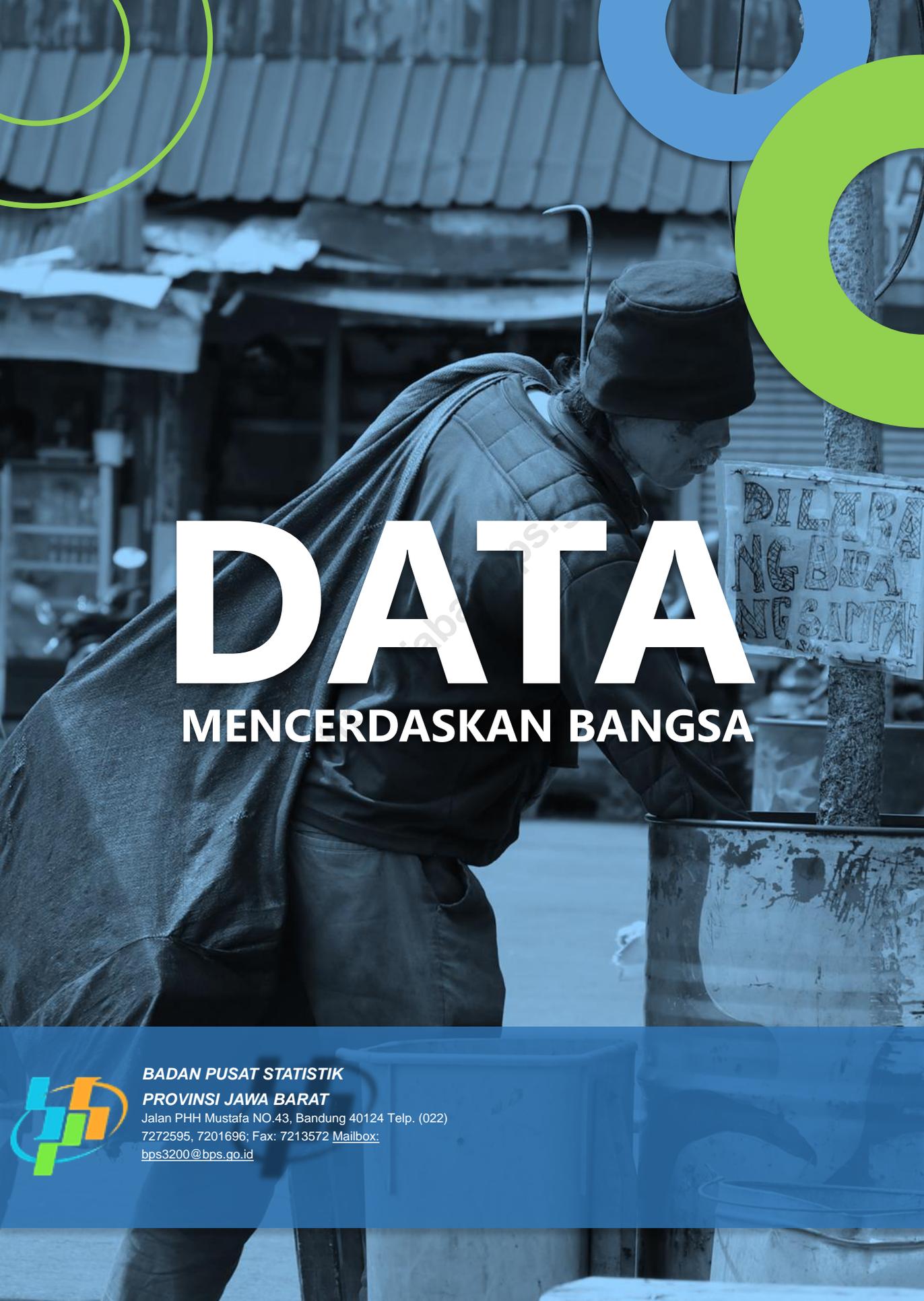
2. Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antarwaktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

### **3.2. Ukuran Bank Dunia**

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.
3. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK**

**PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan PHH Mustafa NO.43, Bandung 40124 Telp. (022)

7272595, 7201696; Fax: 7213572 Mailbox:

[bps3200@bps.go.id](mailto:bps3200@bps.go.id)

